



Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin

Agus Sya'bani Arlan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Indonesia

Corresponding Author: Agus Sya'bani Arlan agussyabaniarlan@gmail.com

ABSTRACT

The Government of Sawang Village, South Tapin District, Tapin Regency as a government institution that is ready for disasters immediately descended on the scene of the disaster. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type, the data collection techniques used are interviews, observations and documentation, data sources are taken through purposive sampling of 11 informants. The results of the first study, from the sub-variables of regulators to help overcome the problem have been running optimally. Second, the sub-variable of the regulator with indicators to facilitate the needs for flood management is not optimal for flood management. Third, the dynamizer sub-variable with indicators as an agent to accelerate changes in the village government has not been optimal and has not been maximized. Fourth, the dynamist sub-variable with indicators as an increase in innovation is not optimal because it has not been implemented properly. Fifth, the facilitator sub-variable with indicators as facilities and infrastructure has not been optimal because development in the village has not been carried out properly. Sixth, the facilitator sub-variable with indicators as the provision of counseling has not been optimal because counseling is very rarely carried out. Seventh, the catalyst sub-variable with indicators as a response to various complaints is optimal because the village government always accommodates various community complaints. Eighth, the catalyst sub-variable with multi-stakeholder coordination indicators is optimal because the village government always involves the community. To optimize the role of the Sawang Village Patrol, South Tapin District, Tapin Regency, it is recommended that the Head of Sawang Village should increase knowledge in the form of technical guidance as a provision in helping people affected by the flood disaster, to the community should get used to and comply with the things recommended by the government. And to employees, further increase the socialization program so that the community is aware of the dangers of flooding.

Keywords: Role; Regional Disaster Management Agency, Tapin Regency

ABSTRAK

Pemerintah Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin sebagai lembaga pemerintah yang siap untuk kebencanaan yang langsung turun ke tempat kejadian bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 11 orang informan. Hasil dari penelitian *Pertama*, dari sub variabel regulator membantu mengatasi masalah sudah berjalan optimal. *Kedua*, sub variabel regulator dengan indikator memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir belum optimal untuk penanganan banjir tersebut. *Ketiga*, sub variabel dinamisor dengan indikator sebagai agen mempercepat perubahan pemerintah desa belum optimal dan belum maksimal dapat dilaksanakan. *Keempat*, sub variabel dinamisor dengan indikator sebagai peningkatan inovasi belum optimal karena belum terlaksana dengan baik. *Kelima*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai sarana dan prasarana belum optimal karena pembangunan di desa belum terlaksana dengan baik. *Keenam*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai penyediaan

penyuluhan belum optimal karena penyuluhan sangat jarang dilaksanakan. *Ketujuh*, sub variabel katalisator dengan indikator sebagai respon berbagai keluhan sudah optimal karena pemerintah desa selalu menampung berbagai keluhan masyarakat. *Kedelapan*, sub variabel katalisator dengan indikator koordinasi multi pihak sudah optimal karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran Pemerintahan Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin maka disarankan kepada Kepala Desa Sawang hendaknya meningkatkan pengetahuan berupa bimbingan teknis sebagai bekal dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir, kepada masyarakat hendaknya membiasakan dan mematuhi hal-hal yang dianjurkan pemerintah. Dan kepada pegawai lebih meningkatkan program sosialisasi agar masyarakat sadar terhadap bahaya banjir.

Kata Kunci: Peran; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Kabupaten Tapin

A. PENDAHULUAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu perangkat daerah yang berperan penting dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai isu internal dan eksternal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022, Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Banjir adalah situasi di mana suatu daerah sedang digenangi oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air. Hal ini dikarenakan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir jua dapat dikarenakan oleh limpasan air permukaan (*runoff*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Pada pertengahan Januari 2024, banjir dengan skala luas kembali melanda Indonesia tepatnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di antaranya Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Pentingnya suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tanggul penghambat atau cekdam digunakan sebagai unit perencanaan penanggulangan banjir yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber hutan, tanah, dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi das yang dapat menimbulkan banjir sehingga berdampak negatif bagi masyarakat seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan pengelolaan das secara terpadu, diperlukan perencanaan secara menyeluruh, berkelanjutan dan

berwawasan dalam pengelolaan lingkungan dengan mempertimbangkan das sebagai unit pengelolaan untuk beberapa desa tertentu di antaranya Desa Sawang dan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tapin Selatan.

Bila bencana banjir tiba penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi das mulai daerah hulu sampai hilir. Mengingat Kabupaten Tapin yang rawan bencana banjir pada tahun-tahun sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Tapin berusaha segera mengambil tindakan-tindakan yang tepat tentang penanggulangan bencana banjir tersebut, sesuai otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi di daerah-daerah tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan: (1) bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tapin merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; (2) bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah agar dapat diimplementasikan di daerah secara terencana, terkoordinasi dan terpadu; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Bentuk peran Pemerintah Desa Sawang dalam penanggulangan bencana banjir selama ini mereka sudah membuat sebuah peta yang mana daerah tersebut menjadi daerah yang sangat rawan banjir. Lalu saling berkoordinasi dengan dinas terkait tentang penanggulangan bencana daerah tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan banjir yang ada pada Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Sejauh ini peran pemerintah desa sudah bekerja secara maksimal dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana. Desa Sawang juga sudah merumuskan perihal kebijakan penanggulangan bencana banjir dan mereka sudah memberikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir.

Menurut data yang diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, jumlah anggota keluarga yang terdampak bencana banjir di Kecamatan Tapin Selatan berjumlah 544 jiwa.

Menurut info yang diambil pada Harian Radar Banjarmasin, sebanyak 45 buah rumah di Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan

Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan terendam banjir. Menurut Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin, bahwa banjir tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan yang turun beberapa hari terakhir. Selain Desa Sawang, bencana banjir juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Tapin selatan seperti Desa Harapan Masa dan Desa Tambarangan yang mengakibatkan puluhan rumah terendam air.

Di mana bencana banjir selalu melanda Kecamatan Tapin selatan khususnya Desa Sawang, Desa Harapan Masa dan Desa Tambarangan secara rutin pada setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tapin Selatan berada pada urutan pertama untuk jumlah anggota keluarga yang terdampak bencana banjir dengan jumlah 135 jiwa. Beberapa desa yang sering terdampak banjir di Kecamatan Tapin Selatan di antaranya adalah Desa Tambarangan dengan ketinggian air sekitar 30 cm dan Desa Harapan Masa dengan ketinggian air sekitar 10 cm-15 cm. Kedua desa ini selalu menjadi langganan banjir pada setiap tahunnya karena kedua desa tersebut merupakan desa yang memiliki dataran rendah. Penentuan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif bertumpu pada suatu fokus masalah adalah keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan usaha untuk mencari suatu jawabannya. Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dan penelitian berjudul Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin.

Fokus penelitian pada Peran Pemerintah Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin menggunakan teori oleh Arif (dalam Nurdin, 2014): (1) Regulator; (2) Dinamisator; (3) Fasilitator; (4) Katalisator

B. LITERATUR REVIEW

Pengertian Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang di mana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan dengan kedudukannya, bahwa orang tersebut menjalankan suatu peran-peran dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peran.

Menurut Robbins dan Judge dikutip dalam Saraswati dan Sirait (2015:182) "peran adalah suatu rangkaian pola pada perilaku yang dihadapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu unit sosial".

Menurut Soejono Soekanto (2017:221) "peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu perannya".

Menurut Puwadarminta (2015:571): peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dalam suatu peristiwa tersebut merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) "peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas di mana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut di mana posisi tersebut masih berstruktur sosial, yaitu dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi, Paham strukturisasi ialah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu".

Pengertian Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam (Purwadarminta, 2006)

Menurut Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007).

Pengertian Banjir

Menurut Khotimah, dkk (2013), banjir adalah aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kehilangan jiwa, sedangkan dalam istilah teknik diartikan sebagai aliran air sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampung sungai tersebut.

Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Jenis-Jenis Banjir

Menurut Ristya (2012), berdasarkan sumber asal limbah air yang menyebabkan banjir, terdapat dua jenis banjir, yaitu: (1) Banjir Lokal, Banjir lokal disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan belum tersedianya sarana drainase yang memadai. Banjir lokal ini lebih bersifat setempat, sesuai dengan luas sebaran hujan lokal. Banjir ini semakin parah apabila saluran drainase tidak berfungsi secara optimal, di mana saluran tersebut tersumbat sampah, sehingga mengurangi kapasitas penyalurannya; (2) Banjir Kiriman, Banjir kiriman disebabkan oleh peningkatan debit air sungai yang mengalir. Banjir ini diperparah oleh kiriman dari daerah atas. Sebagian besar sebagai akibat bertambah luasnya daerah terbangun dan mengubah koefisien aliran di daerah tangkapan, sehingga semakin banyak air yang menjadi aliran permukaan, sebaliknya semakin sedikit air meresap menjadi air tanah

Faktor-Faktor Penyebab Banjir

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), “faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti: perubahan kondisi DAS, kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat”. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau pada Pasal 15: “untuk bangunan yang terdapat di sempadan sungai minimal jarak rumah dari tepi sungai yaitu 10 meter dari tepi kiri dan

kanan sungai, dan apabila sungai terlalu dalam melebihi 3 meter maka jarak dari sempadan sungai lebih dari 10 meter.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yaitu di Desa Sawang, Tambarangan dan Harapan Masa. Peneliti hanya memilih 2 lokasi/desa, yaitu desa Sawang dan Desa Tambarangan karena peneliti memandang bahwa 2 desa tersebut merupakan desa yang memiliki dataran rendah dan hampir seluruh wilayah terendam air.

Metode penelitian secara pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data melalui penarikan secara *purposive sampling* dan berjumlah 11 orang. Data dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan *membercheck*.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tapin adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rantau, yang merupakan bagian dari kecamatan Tapin Utara. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.174,95 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.412 jiwa (2023), dengan kepadatan penduduk 91 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Tapin meliputi lansekap daerah aliran Sungai Tapin. Sungai Tapin mempunyai empat cabang, yaitu Sungai Muning, Sungai Tatakan, Sungai Halat, dan Sungai Gadung.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada 2°32'43" hingga 3°00'43" LS dan 114°46'13" hingga 115°30'33" BT.

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km² yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali Kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya.

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km² atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km² atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Peran Pemerintah Desa Sawang dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin

Peran dalam penelitian memiliki kontribusi yang penting dalam keseluruhan proses penelitian. Kolaborasi antara berbagai pihak dengan peran yang berbeda dapat meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian. Peran Pemerintah Desa Sawang dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dapat diukur dari beberapa indikator yang relevan berkaitan dengan hasil yang akan diteliti.

Peran Pemerintah sebagai regulator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).

Membantu Mengatasi Masalah

Peran pemerintah Desa Sawang dalam membantu mengatasi masalah sudah baik karena pemerintah desa selalu mengupayakan memberikan bantuan untuk mereka yang terdampak banjir dan membagikan langsung ke rumah warga dibantu oleh ketua RT.

Memfasilitasi Kebutuhan Guna Penanganan Banjir

Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir, pemerintah desa dapat membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan banjir, melindungi masyarakat dari resiko banjir, dan membangun ketahanan bencana di tingkat lokal. Peran pemerintah Desa Sawang dalam memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir cukup baik karena mereka memiliki rencana dalam pembangunan infrastruktur jalan walaupun belum dapat dilaksanakan karena harus mempertimbangkan anggaran berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Des.

Peran Pemerintah sebagai dinamisator

Dinamisator adalah sosok atau entitas yang bertindak sebagai penggerak utama dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan, memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam upaya pembangunan desa.

Sebagai Agen Mempercepat Perubahan

Sebagai agen mempercepat perubahan, Pemerintah Desa Sawang memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan transformasi

positif di tingkat desa. Sebagai agen perubahan, Pemdes bertindak sebagai penggerak utama yang mempercepat proses pembangunan dan perubahan menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Peran ini melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Pemdes untuk mencapai perubahan yang diinginkan oleh masyarakat desa.

Peran Pemerintah Desa Sawang sebagai agen mempercepat perubahan kurang baik karena dapat dilihat dari karena upaya penanggulangan banjir belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga perubahan belum dapat dilakukan.

Peningkatan Inovasi

Peningkatan inovasi adalah proses di mana suatu organisasi, individu, atau masyarakat secara aktif menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan ide-ide baru, metode, atau produk untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau nilai tambah dalam berbagai bidang kehidupan.

Peran Pemerintah Desa Sawang dalam peningkatan inovasi masih kurang baik jika dilihat dari belum terlaksana dengan baik dilihat dari inovasi yang belum dapat ditingkatkan karenanya program yang ingin mereka jalankan.

Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak sebagai penghubung antara berbagai pemangku kepentingan, menciptakan regulasi yang mendukung investasi dan inovasi, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merujuk pada infrastruktur fisik dan non-fisik yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, baik dalam skala individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Sawang masih kurang baik karena belum lengkap jika dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki desa sangat terbatas.

Penyediaan Penyuluhan

Penyediaan penyuluhan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada

masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan, pertanian, lingkungan, pendidikan, dan topik-topik lain yang relevan. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator merupakan peran yang bertujuan untuk merangsang, mempercepat, dan memfasilitasi proses pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi. Sebagai katalisator, pemerintah bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya transformasi positif dalam berbagai sektor dan memobilisasi berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Respon berbagai keluhan

Respon berbagai keluhan pemerintah Desa Sawang sudah baik karena pemerintah desa selalu mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan berusaha untuk merencanakan pembangunan dalam penanggulangan bencana banjir.

Koordinasi Multi Pihak

Koordinasi multi pihak merupakan proses di mana berbagai pihak atau pemangku kepentingan yang berbeda bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang kompleks. Koordinasi ini melibatkan kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama antara berbagai entitas yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda dalam suatu inisiatif atau proyek.

Koordinasi multi pihak antara pemerintah Desa Sawang sudah baik karena pemerintah Desa Sawang sudah berkoordinasi langsung dengan masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapin dan UPTD Puskesmas dalam penanggulangan bencana banjir.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan: (1) bahwa secara geografis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Tapin merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, nonalam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; (2) bahwa ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang ada memerlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan

Daerah agar dapat diimplementasikan di daerah secara terencana, terkoordinasi dan terpadu; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Sawang dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Faktor Pendukung

Tanggung Jawab Sosial

Bahwa peran Pemerintah Desa Sawang dalam membantu mengatasi masalah sudah baik karena sejauh ini pemerintah desanya selalu mengusahakan pembangunan dalam penanggulangan bencana banjir.

Penguatan Kualitas Pelayanan

Pemerintah Desa Sawang dalam koordinasi multi pihak sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari mereka yang selalu melibatkan masyarakat dan dinas terkait yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam penanggulangan bencana banjir.

Faktor penghambat

Keterbatasan Anggaran

Fasilitas kebutuhan guna penanggulangan banjir di desa Sawang belum cukup baik karena dilihat dari fasilitas jalan dan alat-alat pendeteksi banjir belum memadai.

Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Penyediaan penyuluhan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sawang, kurang baik karena penyuluhan sangat jarang dilaksanakan hanya beberapa kali pernah diadakan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut sehingga pemerintah desanya juga malas melakukan kegiatan penyuluhan.

E. SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sawang dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin belum optimal dilihat dari indikator. *Pertama*, dari sub variabel regulator membantu mengatasi masalah sudah berjalan optimal. *Kedua*, sub variabel regulator dengan indikator memfasilitasi kebutuhan guna penanganan banjir belum optimal untuk penanganan banjir tersebut. *Ketiga*, sub variabel dinamisor dengan indikator sebagai agen mempercepat perubahan pemerintah desa belum optimal dan belum

maksimal dapat dilaksanakan. *Keempat*, sub variabel dinamisor dengan indikator sebagai peningkatan inovasi belum optimal karena belum terlaksana dengan baik. *Kelima*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai sarana dan prasarana belum optimal karena pembangunan di desa belum terlaksana dengan baik. *Keenam*, sub variabel fasilitator dengan indikator sebagai penyediaan penyuluhan belum optimal karena penyuluhan sangat jarang dilaksanakan. *Ketujuh*, sub variabel katalisator dengan indikator sebagai respon berbagai keluhan sudah optimal karena pemerintah desa selalu menampung berbagai keluhan masyarakat. *Kedelapan*, sub variabel katalisator dengan indikator koordinasi multi pihak sudah optimal karena pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat.

Faktor pendukung antara lain tanggung jawab sosial dan penguatan kualitas pelayanan. Faktor penghambat yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Disarankan Kepada kepala Desa Sawang agar dapat membuat perencanaan dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk nanggulangan bencana banjir. Koordinasikan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan terkoordinasi agar banjir di Desa Sawang dapat teratasi. Kepada Kasi Kesejahteraan agar lebih memaksimalkan peranannya dan kepada masyarakat penting memiliki kesadaran akan resiko banjir dan dampaknya bagi kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 *Tentang Penanggulangan Bencana Banjir*
- Anonim. Peraturan Tapin Nomor 1 Tahun 2020 *Tentang Penanggulangan Bencana*
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta Kencana:Pustaka Belajar
- Keban, T Yeremias. 2017. *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta:Gava Media 2017
- Nurdin. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Poedarminta. 2015. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta:Absolut.
- Rahayu. 2019. *Kepuasan Kinerja*. Pontianak: Fakultas Teknik Industri

- Riadi, Muchlisin. 2022. Banjir (Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pengendalian). Diakses pada 3/6/2024, dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/07/banjir.html>
- Sodikotul, Muharisah. 2021. *Konstruksi Pemberitaan Banjir Kalimantan Selatan*. Semarang: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat; Exploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Yohana. C, Griandini. D, Muzambeq. S. 2017. *Penerapan Pembuatan Teknik Lubang Biopori Resapan Sebagai Upaya Pengendali Banjir*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*. Vol. 1, No. 2 Desember 2017. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpm/article/view/4870>